

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Arifah Nasution¹⁾, Mutiara Alif²⁾, Nurhayati Hrp³⁾

^{1), 2), 3)} *Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan*

Email: nasutionarifah6@gmail.com¹⁾, mutiaraaliffadillah0@gmail.com²⁾, nurhayatiharahap.2710@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The fundamental thing regarding Financial Performance is Regional Development Planning and Budgeting, namely because development can only be carried out if it is supported by financing or known as a budget. The Development Planning System in Indonesia adheres to a planning and budgeting system. The aim of this research is to analyze regional financial performance through regional development planning and budgeting. This research method The researcher conducted a literature study to collect data and information related to evaluating regional financial performance through planning analysis and regional development budgeting. Literature studies are carried out through searching and analyzing various sources of information such as books, journals, articles and other related documents. The research results show that the implementation of the plan will not run smoothly if it is not based on good planning. In line with this, in order to increase the efficiency and effectiveness of resource allocation, as well as increase the transparency and accountability of development program management, it is necessary to control and evaluate the implementation of development plans. The policy planning formulation process must synergize the time management of each actor. Ideally, the implementation of the development plan formulation is carried out in stages. This research concludes with an analysis of regional financial performance through comprehensive and effective development planning and budgeting in order to achieve regional goals. Control is carried out with the aim of ensuring that the implementation of development plans is in accordance with the stated goals and targets

Keywords : Regional Financial Performance, Planning, Regional Development

ABSTRAK

Hal mendasar mengenai Kinerja Keuangan adalah Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, yaitu karena pembangunan hanya bisa dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan atau dikenal dengan anggaran. Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia menganut sistem perencanaan dan penganggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan daerah melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Metode penelitian ini Peneliti melakukan studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan evaluasi kinerja keuangan daerah melalui analisis perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Studi literatur dilakukan melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Proses perumusan perencanaan kebijakan yang dilakukan harus mensinergikan tatakelola waktu dari masing-masing aktor. Idealnya pelaksanaan perumusan rencana pembangunan dilakukan secara berjenjang. Dalam penelitian ini disimpulkan analisis kinerja keuangan daerah melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan yang komperhensif dan efektif agar dapat mencapai tujuan daerah. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Kata Kunci: *Kinerja Keunagan Daerah , Perencanaan,Pembangunan Daerah*

1. Pendahuluan

Kinerja Keuangan Daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini mengacu pada Sistem Pemerintahan Negara Syamsi (2013:199). Contoh kasus dalam hal ini, Indonesia. Dari sistem Negara Kesatuan yang dianut melahirkan “daerah” dan dengan sendirinya terdapat hirarki “pusat-daerah”. Konsekwensi demikian menempatkan daerah bukan sebagai entity tunggal, melainkan terintegrasi secara horisontal-vertikal. Horisontal hubungan antar

daerah, vertikal hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dimana APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidaklah cukup berbicara kinerja keuangan daerah tanpa memahami mengenai APBD dan mekanisme pengelolaan

dan penyusunannya. Kinerja Keuangan Daerah juga berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional (Andi,Abdul:2005).

Hal mendasar mengenai Kinerja Keuangan adalah Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, yaitu karena pembangunan hanya bisa dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan atau dikenal dengan anggaran. Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia menganut sistem perencanaan dan penganggaran. Perencanaan pembangunan dilakukan bersamaan dengan penganggaran dalam bentuk APBN-APBD. Para pelaku pembangunan patut mengetahui sistem penganggaran pembangunan daerah, mekanisme penganggaran dan tujuan penganggaran, termasuk hubungan antara perencanaan dan penganggaran.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah menjadi salah satu hal yang sangat krusial. Perencanaan dan penganggaran yang baik dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dapat diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki prioritas dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan daerah melalui analisis perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah menjadi penting dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Landasan Teori

2.1 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Daerah/kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menurut (Halim, 2016). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut (Halim,2002,h.128). Yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses sistematis untuk menentukan tujuan, strategi, kebijakan, rencana, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan (Sumarjo,2012,h.88). Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia

dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang kompleks dan harus melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Dengan perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan akan tercipta pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah.

2.3 Penganggaran Pembangunan Daerah

Penganggaran Pembangunan Daerah dibuat dengan mengacu kepada rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja). Renstra satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada tingkat daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sedangkan Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. (Sujarweni, 2015).

Menurut Mardiasmo (2002:62) Penganggaran pembangunan daerah juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa/kelurahan, kegiatan konsultasi publik, atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan penganggaran pembangunan daerah yang baik, diharapkan program dan kegiatan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Bedasarkan hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kani, dkk. (2012) menunjukkan jika kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Sumatera Barat untuk merealisasikan perencanaan dan penganggaran dalam kurun waktu 2006 - 2008 masih rendah, Sedangkan hasil penelitian Meri Darlina, dkk (2016) menunjukkan tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi masih rendah. Dari kedua penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sampai saat ini rata-rata Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintah yang sangat penting belum memiliki perencanaan dan penganggaran yang baik sedangkan tingkat kesejaterahan dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pemerintah melalui anggaran yang dibuat.

Dari paparan di atas disimpulkan bahwa masih terdapat masalah yang terjadi pada perencanaan dan penganggaran Daerah/Pemerintah. Dalam hal ini harus ada penanganan yang dilakukan secara komperhensif dan terkoordinasi dari pemerintah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis kinerja keuangan Daerah melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

3. Metodologi

Peneliti melakukan studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan evaluasi kinerja keuangan daerah melalui analisis perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Studi literatur dilakukan melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait lainnya (Zed, 2008:3). Penelitian kualitatif pada latar belakang ilmiah sebagai kebutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif dan menganalisis data secara induktif. Metode penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang kinerja keuangan daerah melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Dari paparan di atas terdapat hasil yang menunjukkan bahwasanya perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*), evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*). Tolak ukur keberhasilan penyusunan rencana pembangunan daerah.

1. Sinergi perencanaan pembangunan (pusat dan daerah)
2. Sinergi pencapaian pembangunan (pusat dan daerah)
3. Sinergi pendanaan (desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan)
4. IPM Meningkat.

Perencanaan wilayah mencakup berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat (Miraza, 2005).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kinerja Keuangan dalam Pembangunan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk membiayai

jalannya sistem pemerintahan, pembangunan daerahnya, pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986). Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada masukan (*input*) program, tetapi juga pada pengeluaran (*output*) dari program tersebut.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua undang-undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, dilakukanlah analisis rasio keuangan terhadap APBD. Salah satu rasio yang dapat digunakan adalah Rasio Upaya fiskal. Rasio ini membandingkan antara total realisasi PAD terhadap total anggaran PAD sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya.

4.2.2 Faktor-Faktor Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Kendala dan permasalahan implementasi program kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan, yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi antara perencanaan dengan implementasi-nya. Penyebab distorsi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Hogwood dalam proses pembangunan daerah.

1. Hambatan Eksternal

Kegagalan implementasi belum tentu dikarenakan karena lemahnya kebijakan, namun bisa jadi karena faktor-faktor diluar organisasi. Seringkali antara lembaga perencana kebijakan dan lembaga teknis pelaksana kebijakan memiliki gap karena ketergantungan dengan pihak lain. Sebagai contoh pada beberapa program pengentasan kemiskinan untuk menentukan sasaran program diperlukan data dan informasi dari instansi diluar pemerintah daerah. Ketersediaan data informasi yang dikeluarkan oleh lembaga diluar pemerintah daerah dalam hal waktu seringkali momennya tidak bertepatan dengan kapan data itu dibutuhkan. Ketika proses perencanaan program/kegiatan membutuhkan data sering data tidak setrta merta tersedia. Dari sisi kelengkapan data juga sering mengalami kendala, kebutuhan suatu data untuk proses analisis sangat tergantung dengan pihak lain. Sebagai contoh BPS adalah lembaga di luar pemerintah daerah yang berwenang menyediakan data statistik dasar. Kebutuhan data-data yang dihasilkan BPS sangat tinggi sedangkan ketersediaannya tentunya menunggu *release* dari BPS.

2. Waktu Dan Sumber Daya
 - a. Proses perumusan perencanaan kebijakan yang dilakukan harus mensinergikan tatakelola waktu dari masing-masing aktor. Idealnya pelaksanaan perumusan rencana pembangunan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkatan desa sampai dengan provinsi, akan tetapi masalah-masalah yang terjadi di lapangan menyebabkan tidak semua pedoman pelaksanaan dapat dilalui dengan baik. Hal tersebut masih ditambah dengan perumusan kebijakan di tingkat provinsi harus disinergikan dengan kebijakan dari pusat sedangkan tatakala waktunya kadang tidak bertepatan. Kendala waktu seperti dicontohkan di atas tentunya akan membawa dampak seperti terjadinya distorsi atas berbagai hal yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan.
 - b. Tidak semua aktor yang terlibat dalam proses kebijakan memiliki sumber daya yang sama baik itu SDM maupun sumber daya yang lain. Keterbatasan SDM maupun sumber daya lainnya akan mempengaruhi perumusan kebijakan mana saja yang perlu diprioritaskan atau didahulukan. Jika kapasitas SDM tidak mendukung seringkali para aktor tidak bisa secara ideal merumuskan kebijakan.
3. Kebijakan yang tidak didasarkan pada landasan pemikiran (teoritis) yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai
 - a. Keterbatasan waktu pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi pada kualitas rumusan kebijakan yang dibuat. Proses kebijakan memerlukan waktu yang ideal dalam perumusannya sehingga analisa-analisa yang diperlukan dalam proses kebijakan mempunyai kualitas yang baik. Seringkali keterbatasan waktu dan kelengkapan data informasi menyebabkan rumusan kebijakan yang dibuat tidak didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat dikarenakan analisa-analisa yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara ideal.
 - b. Hal tersebut dapat dilihat dalam penyusunan APBD, pada saat perencanaan, besaran anggaran masih sangat indikatif maka sering disebut sebagai pagu indikatif. Pada posisi pagu indikatif itulah jumlah yang akan disasar sangatlah terbatas dan selektif karena proses teknokratis menuntut seperti itu. Namun pada proses berikutnya yaitu penganggaran (KUA PPAS dan APBD) selalu terjadi perubahan kemampuan keuangan daerah (kepastian DAU, DAK dan Dana Perimbangan lainnya), sehingga menimbulkan perubahan pagu indikatif menjadi plafon anggaran dan selanjutnya menjadi definitif anggaran (DPA). Perubahan rupiah tentunya memicu perubahan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Perubahan-perubahan yang terjadi seharusnya juga ditindaklanjuti dengan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa hal. Keterbatasan waktu sumber daya tentunya akan mempengaruhi kualitas analisa, dampak selanjutnya pemikiran teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai tidak mendasari kebijakan yang dirumuskan.
4. Lembaga Pelaksana Jarang yang Mandiri
 - a. Lembaga pelaksana teknis kebijakan jelas terlihat tidak bisa mandiri. Intervensi dari pihak eksternal pelaksana teknis, keterbatasan waktu, keterbatasan data dan informasi membuat pelaksana akhirnya justru melaksanakan kepentingan pihak yang lebih dominan. Pelaksana teknis kebijakan tidak bisa secara kuat kemandiriannya dalam melaksanakan kebijakan. Padahal seharusnya jika menyangkut sasaran dari kebijakan tentunya lembaga pelaksana teknis yang memiliki dasar pengetahuan yang paling dominan.
 - b. Ketergantungan pelaksana teknis kebijakan terhadap pihak lain dapat dilihat dalam penentuan sasaran suatu program/kegiatan. Contoh yang jelas dapat dilihat dalam beberapa program kegiatan pengentasan kemiskinan. Sasaran program/kegiatan ditentukan oleh satu lembaga yang ditunjuk Pemerintah (BPS), kebutuhan data/informasi penerima program tidak serta merta dapat disediakan oleh BPS, kenyataannya prosedur untuk mendapatkan data tidak selalu mudah.
5. Jarang ada kesepakatan yang umum di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya

Salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan tahunan pemerintah daerah adalah penyusunan dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Dokumen RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pemerintah Pusat yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

5. Kesimpulan

Kinerja Keuangan Daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini mengacu pada sistem pemerintahan negara. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan analisis perencanaan dan penganggaran pembangunan secara berkala dan mengikuti strategi-strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang optimal.

Daftar Pustaka

- Syamsi, Ibnu. 2013. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Cetakan ke 4. Rineka Cipta. Jakarta.
- Abdul Halim. 2005. ANALISIS INVESTASI. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta.
- Sumarjo, Hendro. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi : Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Natalia, L., & Astuti, T. D. (2016). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Sosio Humaniora*, 6(1)
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Undang Undang No 5 Tahun 1974, tentang Pemerintahan di Daerah.
- Zed, Mestika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor.
- Mente. L. 2010. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi. Universitas Muslim Indonesia*. Makassar. Vol.11
- Nasir dan Darlis. 2012. Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Al Fino Losa*. Universitas Negeri Padang. Padang. Vol 1 Sularso. H dan Restianto. Y. E. 2011.
- Wahyuni. N, 2007. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*. Bengkalis
- Jumino dan Edi Mulyanto. 2021. Analisa Perencanaan Regional Tangerang Selatan. *Jurnal PEKOBIS*. Universitas Pamulang
- Sulfi.P. 2019. Pengaruh Learning Organitazion , Kopetensi, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada BNI Kantor Cabang Tebet. *Jurnal PEKOBIS*. Universitas Pamulang